

RINGKASAN

Laporan Komos Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam kurun waktu 2017-2020 terdapat 2.374 kasus pelanggaran netralitas birokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada. Data tersebut bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan merit sistem terutman menyangkut dengan netralitas politik birokrasi. Melalui UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, PP No 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah melarang dengan keras ASN atau birokrasi terlibat dalam politik praktis. Namun demikian, regulasi tersebut belum sepadan dengan apa yang diharapkan melalui agenda reformasi birokrasi. Kenyataannya, birokrasi selalu terlibat dan terperangkap pada dukungan politik dan dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melanggengkan kepentingannya. Merujuk pada hal dimaksud, perspektif budaya politik birokrasi dapat dijadikan sebagai pisau analisi dalam melihat netralitas birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Atas hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang budaya Politik birokrasi serta faktor yang mempengaruhi budaya politik birokrasi pada Pemilu 2019 di kabupaten Boalemo. Dengan demikian, Adapun yang menjadi metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi dan jawaban terkait permasalahan netralitas birokrasi dalam setiap agenda Pemilu maupun Pilkada

Kata kunci: *Budaya Politik , Birokrasi, Pemilu*